

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh yang dimiliki oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai pengambil keputusan kebijakan luar negeri Selandia Baru terkait *climate refugee*. Perubahan iklim saat ini telah diidentifikasi sebagai salah satu isu pembangunan manusia yang krusial dan mungkin dapat menjadi tantangan kemanusiaan serta ekonomi terbesar yang harus dihadapi oleh dunia internasional dalam beberapa dekade mendatang (Atapattu, 2017). Konsekuensi lainnya yang tidak kalah signifikan adalah timbulnya kondisi di mana sekelompok masyarakat tertentu harus meninggalkan wilayah di mana mereka tinggal akibat perubahan iklim, yang dikenal dengan sebutan *climate refugee* (Fröhlich & Klepp, 2018). Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap dampak dari perubahan iklim, negara-negara pulau kecil di Kepulauan Pasifik seperti Fiji, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, dan Vanuatu menjadi sangat rentan terhadap perpindahan akibat iklim (Karakitapoglu et al., 2017). Dalam situasi ini, penduduk pulau yang rentan terhadap perubahan iklim kemudian cenderung bermigrasi ke lokasi yang lebih aman, baik di negara mereka sendiri atau melintasi perbatasan. Selandia Baru, sebagai salah satu negara besar dan maju di Kawasan Pasifik, kemudian secara otomatis menjadi pilihan pertama dan terdekat bagi para *climate refugees* untuk bermigrasi. Selandia Baru secara nyata telah memainkan peran utama di Pasifik dalam menanggapi perpindahan akibat iklim selama bertahun-tahun melalui program adaptasi dan mitigasi seperti melindungi sumber daya perikanan, melakukan berbagai proyek bantuan dan penelitian terhadap bantuan bencana, memasang pasokan energi terbarukan, bahkan memperkenalkan inisiatif “*experimental humanitarian visa*” pada tahun 2017 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Jacinda Ardern (Ghosh & Orchiston, t.t.).

Sejak awal, Ardern telah mengidentifikasi perubahan iklim sebagai isu yang amat krusial bagi generasinya serta memiliki pendekatan berbasis nilai terhadap

kebijakan luar negeri, salah satunya dengan menawarkan Selandia Baru sebagai rumah bagi para pengungsi. Dalam salah satu kegiatan diskusi oleh kelompok yang menyuarakan suara komunitas migran dan pengungsi, Ardern menyatakan “Kitalah yang memanfaatkan semua potensi mereka [para pengungsi]. Kami adalah orang-orang yang memanfaatkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman itu. Kami adalah orang-orang yang beruntung, tetapi juga yang memiliki tanggung jawab... dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik dalam hal itu” (Cardwell, 2020). Selain Ardern sebagai pembuat keputusan, Kabinet Ardern, yakni pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Partai Buruh, pada dasarnya juga berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan Pemerintah Selandia Baru. Dalam hal kebijakan luar negeri, Winston Peters, sebagai pemimpin Partai NZ First yang menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri luar negeri, memiliki peran yang besar. Terkait *climate refugees*, Peters menyatakan bahwa kenaikan permukaan laut bukan merupakan ancaman langsung yang besar dan akan terlalu dini untuk memperpanjang kewarganegaraan Selandia Baru kepada para pengungsi yang berpindah akibat dampak perubahan iklim. Ia memandang bahwa akan lebih baik jika Selandia Baru meningkatkan pendanaan internasional kolektif dan mengatasi masalah perubahan iklim yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik (Radio New Zealand, 2019).

Begitu pula halnya dengan Partai Nasional sebagai oposisi. Partai Nasional hingga saat ini masih belum menunjukkan adanya dukungan terhadap urgensi dari perubahan iklim itu sendiri, terlihat melalui bagaimana belum terdapat substansi yang cukup serta kebijakan yang jelas bagi upaya penanganan perubahan iklim (Scoop, 2020). Di sisi lain, Partai Hijau, yang dipimpin oleh James Shaw yang juga merupakan Menteri Perubahan Iklim Selandia Baru, menunjukkan dukungan terhadap *climate refugee*. Shaw menyatakan bahwa Selandia Baru akan menjadi pemimpin dalam mengatasi krisis iklim dan membantu mereka yang berada di wilayah rentan terhadap dampak perubahan iklim (Hall, 2019). Hal ini kemudian diikuti dengan pengumuman bahwa Selandia Baru mempertimbangkan untuk mengeluarkan “*experimental humanitarian visa*” untuk penduduk Kepulauan Pasifik yang bertujuan untuk membawa sekitar 100 orang per tahun ke Selandia

Baru pada Oktober 2017. Ardern menyatakan bahwa Selandia Baru harus siap untuk menerima *climate refugee* dari negara-negara kepulauan di sekitarnya dan menekankan perlunya perubahan dramatis terkait hal tersebut (Dempster & Ober, 2020).

Jacinda Ardern dipandang sebagai sosok berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru karena ia akan terus berinovasi dalam kebijakan dan mengkomunikasikan dengan jelas apa yang ia perjuangkan. Ia juga akan terus menonjol secara global, karena ia merupakan pemimpin perempuan muda yang progresif, dan tidak akan mundur dari persoalan yang sulit (Foreign Policy, t.t.). Dukungan nyata terhadap para pengungsi, diikuti dengan kebijakan dan wacana pembuatan visa khusus bagi *climate refugee* di Kepulauan Pasifik terlepas dari adanya perbedaan usulan dari berbagai pihak, juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari Jacinda Ardern sebagai pemegang kuasa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Selandia Baru terkait *climate refugee*.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Jacinda Ardern memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan *climate refugee* Selandia Baru?

1.3 Tinjauan Pustaka

Terkait dengan pengaruh yang dimiliki oleh Jacinda Ardern sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru, pertama, penulis merujuk kepada tulisan Sachdeva (2018) yang menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh Ardern terhadap kebijakan luar negeri Selandia Baru yang awalnya berfokus pada nilai ekonomi menjadi nilai-nilai moral. Sachdeva membandingkan fokus kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Ardern dengan dua Perdana Menteri Selandia Baru sebelumnya, John Key dan Bill English, yang cenderung memiliki fokus merkantilis. Key dan English membingkai interaksi dan relasi Selandia Baru dengan dunia internasional dalam hal hubungan ekonomi dan perdagangan. Key menolak hambatan impor dan investasi, sementara English dalam masa kepemimpinannya yang relatif singkat menekankan pada upaya melawan tantangan

proteksionisme di dalam dan luar negeri. Di sisi lain, Ardern menekankan pada penegakkan “nilai-nilai” Selandia Baru, yakni dengan mempertahankan fokus pada apa yang seharusnya mendefinisikan Selandia Baru baik di dalam maupun di luar negeri.

Berbeda dengan tulisan Sachdeva, Manriquez (2019) menjelaskan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan Jacinda Ardern terhadap kebijakan luar negeri Selandia Baru melalui *Leadership Trait Analysis* (LTA). Studi ini menemukan bahwa Ardern memiliki kecenderungan untuk menghargai batasan, terbuka terhadap informasi, serta dapat menjadi reaktif atau akomodatif. Kecenderungan-kecenderungan tersebut membuat Ardern mematuhi kerangka kerja internasional ketika melakukan kebijakan luar negeri, selalu berupaya mengambil tindakan terencana dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru, serta cenderung berfokus pada rekonsiliasi, membangun konsensus, pemberdayaan, akuntabilitas, serta berfokus pada apa yang dapat dilakukan dalam situasi sekarang dengan mempertimbangkan penyebab masalah dan apa yang diperbolehkan oleh konstituen.

Lebih lanjut, pengaruh Jacinda Ardern dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru juga dijelaskan melalui sudut pandang Ardern sebagai pemimpin perempuan. Tulisan Clark (2019) menjelaskan bagaimana di era yang ditandai dengan kemunculan para pemimpin populis yang umumnya laki-laki dan cenderung bersikap otoriter dan reaksioner, Ardern menonjol sebagai sosok pemimpin perempuan yang progresif dan kolaboratif. Di tengah banyaknya pemimpin yang menstigmatisasi dan membangun stereotip terhadap orang-orang yang termarginalkan, Ardern menetapkan kebaikan sebagai prinsip utama dalam kebijakan pemerintahannya. Penulis juga menyatakan bahwa Ardern dipandang akan terus berinovasi dalam kebijakan serta mengomunikasikan dengan jelas apa yang ia perjuangkan, dan Ardern akan terus memberikan pengaruh positif sebagai pemimpin Selandia Baru di tengah dunia yang sedang bergejolak.

Sejalan dengan tulisan tersebut, Johnson & Williams (2020) menjelaskan mengenai pengaruh Jacinda Ardern sebagai pemimpin perempuan dalam kepemimpinannya

di tengah krisis global, yakni pandemi COVID-19. Dikatakan bahwa keberhasilan Ardern membawa Selandia Baru keluar dari masa krisis pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik feminin yang melekat pada pemimpin perempuan. Ardern menunjukkan bentuk feminitas protektif dan memanfaatkan serta mencerminkan konsepsi tradisional tentang peran perempuan, di mana ia berperan sebagai “ibu sekaligus pemimpin dunia”. Ardern digambarkan secara metaforis sebagai ibu pelindung bagi Selandia Baru yang memegang tangan masyarakat Selandia Baru sepanjang masa krisis, yang penuh empati dan rasa peduli terhadap kecemasan masyarakat.

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai bagaimana Jacinda Ardern berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Selandia Baru melalui sudut pandang fokus kebijakan dan pemimpin perempuan secara umum, gaya kepemimpinan, serta kepemimpinan dalam krisis COVID-19. Penelitian ini menjadi signifikan karena akan berfokus pada mengapa Jacinda Ardern dapat memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru, secara spesifik terkait *climate refugee*.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Pengaruh Pemimpin dalam Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan elemen penting yang berperan sebagai panduan bagi suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasional serta memperoleh posisi yang layak di antara negara-negara lainnya (Bojang, 2018). Hopkins & Mansbach (1973 dalam Dugis, 2007) menjelaskan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri, di antaranya adalah faktor eksternal, peran, pemerintah, aktor sosial, serta individu. Pertama, faktor eksternal yakni kemampuan kemampuan relatif suatu negara dan posisi strategisnya di dalam struktur sistem internasional dalam kaitannya dengan negara lain. Kedua, peran yang mengacu kepada serangkaian perilaku terkait dengan semua individu dengan kedudukan atau posisi resmi serupa dalam sistem politik, yang ditentukan secara sosial.

Faktor ketiga adalah pemerintah yang mengacu pada jenis lembaga pemerintah beserta persebaran pengaruh antar lembaga tersebut, kepentingan yang diwakili setiap lembaga, cara pemilihan dan perekrutan anggota lembaga, serta sejauh mana lembaga-lembaga tersebut terbuka bagi perubahan sosial. Keempat, aktor sosial yang mencakup seluruh aspek non-pemerintah, termasuk unsur-unsur seperti kemampuan ekonomi, sumber daya alam, budaya politik, luas wilayah, dan lainnya. Kemudian faktor terakhir adalah individu yang terdiri dari kepribadian, gaya kepemimpinan dan politik, nilai-nilai, dan pengalaman yang membuat setiap pemimpin negara unik dalam mempengaruhi cara pengambilan dan kualitas keputusan dalam kebijakan luar negeri. William D. Coplin (2003) dalam tulisannya menjelaskan bahwa pemimpin negara, baik presiden, perdana menteri, ataupun raja memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan peran yang dimainkan oleh pemimpin dalam memahami serta menafsirkan kendala yang dihadapi.

Para pemimpin mendefinisikan kendala internasional serta domestik dari suatu negara, di mana interpretasi yang diberikan oleh pemimpin pada dasarnya muncul melalui pengalaman, tujuan, pandangan mereka tentang dunia, serta kepekaan terhadap konteks politik (Hermann & Hagan, 1998). Persepsi-persepsi yang mereka berikan kemudian dapat membantu untuk membingkai orientasi pemerintah terhadap urusan dalam ranah internasional (Hermann & Hagan, 1998). Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan diplomasi bergantung pada keterampilan kebijakan luar negeri individu (Breuning, 2007). Posisi Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru menjadikannya pemimpin dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pengaruh pemimpin dalam kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisis bagaimana Ardern mempengaruhi kebijakan luar negeri Selandia Baru.

1.4.2 Women in Foreign Policy

Di antara sejumlah faktor yang mempengaruhi para pemimpin dalam pembuatan kebijakan luar negeri adalah peran gender, yang berkaitan dengan bagaimana proses

kepemimpinan dijalankan serta perubahan kebijakan apa yang dituju. Hal ini dikarenakan gender merupakan penyaring yang kuat yang tidak hanya mempengaruhi perilaku, namun juga bagaimana kepemimpinan dipahami, dipersepsikan, dan diinterpretasikan (Aggestam & True, 2021). Karen Smith (2019) dalam tulisannya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kecenderungan perempuan dalam pengambilan kebijakan luar negeri yang membedakannya dengan laki-laki. Pertama, bahwa perempuan memiliki perilaku negosiasi yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan cenderung lebih kooperatif dan peduli, memiliki lebih banyak empati, lebih enggan dalam memberikan dukungan terhadap penggunaan kekerasan, serta lebih berorientasi pada standar dan moral masyarakat (Karpowitz & Mendelberg, 2014).

Hal ini sejalan dengan argumen Fukuyama (1998) yang mengatakan bahwa dunia yang dijalankan oleh wanita akan mengikuti aturan yang berbeda, di mana dunia akan cenderung lebih tidak agresif, kompetitif, dan penuh dengan kekerasan. Kedua adalah perempuan cenderung memiliki gaya manajerial yang berbeda dan lebih bersifat *people-centric*. Dijelaskan oleh McGlen dan Sarkees (1993 dalam Smith 2019) bahwa perempuan cenderung lebih percaya diri serta memiliki gaya manajerial yang lebih berorientasi kepada orang banyak daripada berorientasi pada tujuan. Ketiga adalah kecenderungan pola perilaku dalam *decision-making*. Dalam sejumlah studi yang lebih ekstensif tentang sikap dalam pendapat perempuan dan laki-laki terkait kebijakan luar negeri, sebagian besarnya menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih damai dan relatif lebih tidak militeristik daripada laki-laki. Kerangka pemikiran *women in foreign policy* digunakan untuk menganalisa bagaimana Jacinda Ardern sebagai pemimpin perempuan dapat mempengaruhi orientasi kebijakan luar negeri Selandia Baru.

1.4.3 Pemimpin Perempuan dan Kebijakan Luar Negeri Feminin

Dalam kajian kebijakan luar negeri menurut *Feminist Foreign Policy* (FFP), terdapat dua bentuk kebijakan luar negeri yaitu kebijakan luar negeri maskulin dan feminin. Ketika kebijakan luar negeri dibentuk di bawah kepemimpinan

perempuan, akan terdapat kecenderungan terbentuknya kebijakan luar negeri yang feminin, dan sebaliknya bagi pemimpin laki-laki yang cenderung membentuk kebijakan luar negeri maskulin. Kebijakan luar negeri maskulin sendiri berkaitan erat dengan kekuasaan, konflik dan pengembangan senjata, kolonialisme, dan hegemoni. Konsep hegemoni, yakni gagasan untuk memusatkan kekuasaan di tangan satu pihak sehingga pihak tersebut dapat mendominasi atas semua aktor lainnya, merupakan konsep yang mencerminkan maskulinitas. Perang, militer, dan kekerasan juga berkaitan erat dengan kebijakan luar negeri maskulin. Identitas maskulin seringkali diidentikkan dengan otonomi dan pengambilan resiko, rasionalitas, dan daya tahan (Gleeson, 2018).

Kebijakan luar negeri feminin di sisi lain merupakan kebijakan yang memprioritaskan kesetaraan gender dan menjunjung tinggi hak asasi perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang diimplementasikan melalui alokasi sumber daya yang signifikan dalam berbagai bidang yang umumnya didominasi oleh laki-laki, seperti bantuan, diplomasi, perdagangan, dan pertahanan (Thompson & Clement, 2019). Salah satu konsep yang melekat pada kebijakan luar negeri feminin adalah konsep *“the ethic of care”*, yang menekankan pada peran sentral perawatan serta praktik moral relasional lainnya dalam semua pengaturan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh di mana konsep ini memberikan pengaruh secara signifikan dalam perubahan kebijakan adalah dalam peningkatan mandat kemanusiaan dari *“the responsibility to protect”*, sebagai motif keterlibatan asing, termasuk di dalamnya penggunaan pasukan *peacekeeping* dan pemberian bantuan keamanan luar negeri. Hal ini menurut Slaughter (2012 dalam Smith 2019) berarti bahwa semakin besar keterlibatan perempuan dalam kebijakan luar negeri, kemungkinan bagi terciptanya dunia yang jauh lebih baik akan semakin besar. Ini juga berarti bahwa pemimpin perempuan dalam kebijakan luar negeri memberikan kesempatan yang lebih baik bagi negara untuk semakin mengedepankan narasi serta upaya perwujudan perdamaian.

Jacinda Ardern sebagai salah satu perempuan yang pernah menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Selandia Baru menunjukkan adanya kecenderungan untuk

membentuk kebijakan feminin. Salah satunya terlihat melalui kebijakan yang suportif terhadap *climate refugee*. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini akan digunakan untuk menganalisa bagaimana kebijakan feminin di bawah pemerintahan Ardern menjadikannya sebagai sosok yang berpengaruh dalam kebijakan terkait *climate refugee*.

1.5 Hipotesis

Perdana Menteri Jacinda Ardern memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan *climate refugee* Selandia Baru dikarenakan sifat feminin yang ditonjolkan Ardern didukung oleh para pengambil kebijakan dan diterima secara luas oleh publik. Sifat tersebut tercermin dalam pandangan Ardern untuk: (1) mengedepankan *ethic of care*; (2) mengedepankan narasi dan upaya perwujudan perdamaian; serta (3) memprioritaskan kesetaraan gender dan menjunjung tinggi hak asasi perempuan;

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Ethic of Care

Konsep *ethic of care* atau etika kepedulian merupakan konsep yang melekat pada kebijakan yang bersifat feminin, melihat bagaimana perempuan cenderung memiliki kemampuan untuk berbicara dalam bahasa moral yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Carol Gilligan (1982) dalam tulisannya menyebutkan bahwa perempuan cenderung lebih menekankan pada etika kepedulian yang berpusat pada daya tanggap dalam suatu jaringan kebutuhan, perawatan, dan pencegahan bahaya yang saling berkaitan. Joan Tronto menjelaskan bahwa etika kepedulian merupakan suatu pendekatan terhadap kehidupan pribadi, moral, sosial, dan politik yang dimulai dari realitas bahwa semua manusia membutuhkan dan menerima perawatan serta kepedulian terhadap orang lain (Tronto, 2009). Konsep etika kepedulian menekankan pada tanggung jawab, relasi, dan koneksi dengan orang lain. Konsep ini juga menekankan pada tanggapan yang cenderung lebih kontekstual terhadap permasalahan moral, di mana resolusi dalam

konsep ini meliputi kepedulian, keterikatan yang berkelanjutan, pengorbanan, tanggung jawab, serta penghindaran menyakiti orang lain (Adhariani, 2017).

Etika kepedulian sebagai perilaku kebijakan luar negeri menekankan pada tanggung jawab untuk melindungi dan sering diekspresikan dalam pengertian perlindungan yang adil bagi kelompok terpinggirkan, khususnya perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi (Aggestam et al., 2018). Penerapan etika kepedulian dalam kepemimpinan berarti bahwa seorang pemimpin bertugas untuk berada di tempat yang tepat dan memperhatikan hal-hal krusial. Ia juga memiliki komitmen terhadap kesejahteraan orang lain sebagai seorang pemimpin yang autentik (Atwijuka & Caldwell, 2016). Merujuk pada sejumlah tulisan di atas, konsep etika kepedulian dipahami sebagai konsep yang melekat pada kebijakan feminin yang berfokus pada pendekatan terhadap kehidupan pribadi, moral, sosial, dan politik yang menekankan pada tanggung jawab, relasi, serta koneksi dengan orang lain. Oleh karena itu, konsep etika kepedulian dalam penelitian ini mengacu kepada pendekatan yang cenderung bersifat responsif dan kepedulian terhadap orang lain serta mengutamakan autentisitas dalam pengambilan keputusan.

1.6.1.2 Upaya Perwujudan Perdamaian

Upaya perwujudan perdamaian merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk dapat berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Perdamaian dunia sendiri didefinisikan sebagai keadaan ideal kebebasan, kedamaian, serta kebahagiaan di antara dan di dalam semua bangsa dan masyarakat dunia. Cita-cita ini kemudian menjadi dasar bagi masyarakat dan bangsa untuk saling bekerja sama, baik secara sukarela ataupun berdasarkan sistem pemerintahan yang melindungi peperangan manusia (Mousseau, 2009 dalam Balogun, 2017). Upaya-upaya tersebut dapat diwujudkan melalui; pertama, interaksi yang kooperatif antar negara, masyarakat, dan organisasi sosial untuk bekerja sama demi keuntungan seluruh umat manusia (Balogun, 2017). Kedua, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, politik, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status

lainnya, serta memastikan keadilan internasional dan HAM universal melalui pengembangan cara-cara untuk melestarikannya (Balogun, 2017). Ketiga adalah mengerahkan semua kemampuan manusia, sains, dan teknologi dalam mengembangkan dan memurnikan lingkungan, serta berfokus untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. Tekanan ekologis akibat perubahan iklim terbukti menjadi faktor yang memperburuk konflik perebutan sumber daya seperti tanah dan air, khususnya di wilayah Afrika Timur. Oleh karena itu, Dan Smith (dalam New Internationalist, 2018) mengatakan bahwa kesepakatan iklim merupakan kesepakatan perdamaian terbesar yang bisa dimiliki dunia.

Melalui sejumlah definisi tersebut, upaya perwujudan perdamaian dipahami sebagai upaya negara dalam mewujudkan perdamaian dunia yang dilakukan melalui kerja sama, baik secara sukarela ataupun berdasarkan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mencegah peperangan. Upaya perwujudan perdamaian dalam penelitian ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Selandia Baru untuk berkontribusi dalam terbentuknya keadaan ideal kebebasan, kedamaian, serta kebangsaan di dalam semua bangsa dan masyarakat dunia, yang menjadi dasar bagi bangsa dan negara untuk saling bekerja sama. Upaya tersebut diwujudkan melalui interaksi yang kooperatif antar negara, promosi dan perlindungan HAM, serta upaya pemurnian lingkungan dan mengatasi persoalan perubahan iklim.

1.6.1.3 Kesenjangan Gender dan Hak Asasi Perempuan

Gender mengacu pada peran sosial yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, serta hubungan antara dan di antara mereka, dalam masyarakat, tempat, dan waktu tertentu. Norma sosial tentang perempuan dan laki-laki, bersama dengan kategori sosial lainnya seperti kelas, orientasi seksual, dan etnis dapat meningkatkan atau membatasi kebebasan seorang individu dan realisasi hak asasi manusianya. Perempuan seperti halnya laki-laki sama-sama memiliki hak asasi mereka masing-masing, di mana di satu sisi hak asasi perempuan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia. Namun di sisi lain juga berbeda dengan pengertian hak asasi manusia yang lebih luas, yang cenderung lebih berpihak pada laki-laki. Karena pada

kenyataannya hak-hak tersebut sering kali diabaikan dan tidak dapat dinikmati oleh kaum perempuan (Hosken, 1981). Sehingga kesetaraan gender dapat dipahami sebagai kondisi di mana perempuan dan laki-laki memperoleh hak, sumber daya, kesempatan, serta perlindungan yang sama. Ini bukan berarti bahwa mereka harus menjadi sama atau diperlakukan sama persis (LeMoyne, 2011).

Namun, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat tercipta ketika kedua pihak dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuasaan dan pengaruh, memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan dan kesempatan bagi pengembangan ambisi pribadi, serta memiliki kesempatan yang sama terhadap kemandirian finansial melalui pendirian bisnis ataupun pekerjaan (Srivastava, 2019). Merujuk kepada definisi oleh Hosken (1981), LeMoyne (2011), dan Srivastava (2019) tersebut, kesetaraan gender dan hak asasi perempuan merupakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, terutama dalam hal pendidikan, pengembangan ambisi pribadi, dan kemandirian finansial, serta memperoleh perlindungan dan distribusi kekuasaan dan pengaruh yang setara. Dalam penelitian ini kesetaraan gender dan hak asasi perempuan dipahami sebagai kondisi adil dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan laki-laki sebagai sesama manusia, di mana terdapat kesetaraan dalam perolehan akses terhadap barang publik, kesempatan yang sama terhadap kemandirian finansial, serta distribusi yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pula dalam hal kekuasaan dan pengaruh.

1.6.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai sejak Jacinda Ardern menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru ke-40, yakni pada tahun 2017, hingga tahun 2021 untuk mengamati perkembangan dari kebijakan Selandia Baru di bawah Perdana Menteri Jacinda Ardern terkait *climate refugee*. Meski demikian, peneliti membutuhkan data-data sebelum tahun 2017 untuk menunjang penelitian ini.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yakni penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan kedudukan, hubungan, dan atau pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis. Penelitian eksplanatif tidak hanya sekedar menggambarkan suatu fenomena, namun menjelaskan alasan dan pengaruh dari terjadinya fenomena tersebut (Sugiyono, 2013).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat, serta pengolahan bahan-bahan penelitian. Data-data tersebut berupa informasi melalui media cetak seperti jurnal, koran, majalah, laporan, dan lainnya; serta media non-cetak seperti rekaman audio, video film, dan bahan elektronik lainnya (Zed, 2004).

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif berupa interpretasi data-data yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambar pola konsep dari hasil interpretasi data linguistik dan/atau visual (Flick, 2013). Sumber data yang dianalisis adalah data-data yang berasal dari pihak yang bersangkutan yakni pemerintah Selandia Baru, juga melalui sumber-sumber pendukung seperti artikel, jurnal, buku, dan tulisan serta penelitian terdahulu yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulisan akan terbagi ke dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, serta metodologi penelitian. Bab kedua berisi deskripsi terkait implementasi *ethic of care* (EoC) dalam kebijakan luar negeri Jacinda Ardern. Bab ketiga berisi upaya-upaya perwujudan perdamaian

dalam kebijakan luar negeri Jacinda Ardern. Bab keempat berisi upaya perwujudan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan dalam kebijakan luar negeri Jacinda Ardern. Bab kelima berisi kesimpulan akhir dari penelitian.